

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN GOWA**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana S-1 pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan



OLEH:

NUR ZAKIAH AWALIAH

E051 191 003

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Zakiah Awaliah

NIM : E051191003

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pertanian di Kabupaten Gowa**" adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 7 November 2023

Yang menyatakan,



Nur Zakiah Awaliah

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN GOWA**

Yang diajukan oleh:

Nur Zakiah Awaliah

E051 191 003

Pembimbing I



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

NIP 19640727 199101 1 001

Pembimbing II



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si

NIP 19790106 200501 1001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

NIP 19640727 199101 1 001

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN GOWA**

Yang diajukan oleh:

Nur Zakiah Awallah

E051 191 003

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 2023

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Sekretaris : Saharuddin, S.IP., M.Si.

Anggota : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.

Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.

()
()
()
()

()
()

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pertanian di Kabupaten Gowa”. Pengajuan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Hal ini disebabkan terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang dimiliki peneliti. Namun, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya pihak lain pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan penelitian hingga penyusunan laporan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang peneliti hormati dan cintai yang

telah memberikan berbagai macam bentuk bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya yang telah menyediakan fasilitas dan suasana akademik yang berkualitas.
3. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si., selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Yang telah memberi banyak bantuan dan kesempatan melalui ilmu hingga kepada

penanganan administrasi kepada penulis hingga meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

4. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran serta kritik yang membangun untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen serta staff Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmunya kepada peneliti selama di bangku kuliah. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi peneliti di dunia dan di akhirat.
6. Seluruh informan peneliti di Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, yaitu Bapak Drs. H. Muh. Fajaruddin, MM (Kepala Dinas), Ibu Ir. St. Jamila Mustari, MM (Sekretaris), Ibu Nurlyah Djamir, S.Pi (Kepala Bidang Tanaman Pangan), Bapak Abu yang telah banyak membantu dan memberikan support bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak A. Moh Rizky Junianto Abe S.STP dan Reski Awalia yang telah membantu peneliti dan kesediaan waktunya dalam melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua, Bapak Pamiluddin Yusuf sebagai cinta pertama peneliti, dan pintu surga ku Ibu Sufriati. Peneliti menyadari bahwa tiada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan rasa syukur ini. Namun, dengan penuh cinta dan ketulusan, izinkan peneliti mengucapkan rasa terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Terima kasih atas segalanya, terima kasih doa, dukungan dan cinta yang tiada henti-hentinya kalian berikan kepada peneliti, khususnya sepanjang perjalanan penelitian skripsi ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang supportif. Terima kasih telah berjuang bersama peneliti, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk mendukung peneliti meraih impian. Tanpa kehadiran kalian, orang tua yang sangat luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, karena kalian merupakan sumber inspirasi dan kekuatan yang tak tergantikan bagi peneliti. Peneliti berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan. Untuk Bapak dan Ibu semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kalian dengan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan umur Panjang. Semoga segala doa yang telah kalian panjatkan untuk peneliti menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

9. Keluarga tercinta yakni Bunda Andi Firsya, Ibu Supriyanti dengan tulus dan penuh rasa syukur peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya, terima kasih selalu menjadi support system dalam setiap langkah peneliti.
10. Rasa terima kasih peneliti ucapkan kepada adik-adik ku Nurhidayah, Muhammad Gusti Insan Kamil, Nurul Aisyah yang menjadi salah satu

alasan semangat tinggi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini agar menjadi contoh teladan yang baik dan menjadi kebanggaan bagi mereka.

11. Kedua kakak tercinta peneliti yaitu Kakak Amaril Maburr, Kakak Rifki Kurniawan yang sabar menghadapi peneliti, yang setia mendengarkan setiap keluhan dari peneliti, terima kasih telah mengajarkan banyak hal, memberikan dukungan kepada peneliti, semoga kebaikan yang selama ini terbalaskan suatu hari nanti.
12. Kepada Dua Atlet andalan Edward dan Michael yang telah membantu baik tenaga dan fikiran dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih telah menghibur penulis dengan segala cerita random yang tidak ada habisnya.
13. Personil Sekret Vibes yakni Kak Abje, Kak Amar, Kak Angga, Kak Auliyah, Kak Mono, Kak Nando, Kak Syam, Kak Tibra, Kak Uci, Arini, Edward, Ikhlas, Ishaq, Jul, Jadda, Kiya, Rahma, Rivalda, Sherli, Zahirah yang senantiasa memberikan dukungan untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
14. Adik adik Ukmb Unhas yang tercinta Anput, Eni, Enky, Fuja, Karmila, Malika, Uyha yang selalu menghibur dan memberikan dukungan kepada peneliti.
15. Sahabat ku Mayestika Fortuna Jaharuddin yang tidak pernah bosan untuk selalu bersama serta selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, *i wish you all the happiness and success in the world*

16. Inisial nama A.R selaku pembimbing ketiga yang selalu sabar menghadapi peneliti, terima kasih telah kebersamaan serta memberikan dukungan, masukan, dan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
17. Teman jauhku Ratna terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama ini, *it means a lot*. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu secepatnya.
18. Terima kasih kepada Ukm Bulutangkis Unhas atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan, semoga semakin jaya dan mampu menjadi wadah untuk para anggota selanjutnya untuk menuangkan kreatifitas, inovasi dan berkualitas.
19. Sobat TheB Makassar Kak Ican, Kak Muti, Nunu, Zarah terima kasih atas dukungan kepada peneliti disertai dengan celotehan dan tawanya.
20. Teman-teman Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
21. Teman-teman KKN Unhas 108 UMKM Bantaeng Posko 3 yakni Mario, Septi, Sisi, Uni, Kiki.
22. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan kepada peneliti.
23. Terakhir, apresiasi sebesar-besarnya kepada diri sendiri : Nur Zakiah Awaliah karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini dalam mengerjakan skripsi ini dengan menyelesaikan semaksimal mungkin, proud of you!

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Implementasi Kebijakan Publik	12
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik	12
2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik	14
2.1.3 Proses Kebijakan Publik.....	15

2.1.4	Konsep Implementasi Kebijakan Publik	16
2.2	Pemerintah Daerah.....	19
2.2.1	Konsep Pemerintah Daerah.....	19
2.2.2	Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah	21
2.3	Pengembangan Sektor Pertanian	23
2.3.1	Pengembangan Sektor Pertanian.....	23
2.3.2	Konsep Dinas Pertanian	25
2.3.3	Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian.....	25
2.3.4	Distribusi Pupuk Subsidi	30
2.3.5	Penyuluhan Pertanian	32
2.3.6	Kelompok Tani.....	35
2.4	Kerangka Konseptual.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
3.3	Fokus Penelitian	41
3.4	Jenis Data dan Sumber Data	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6	Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian	46

4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Gowa.....	46
4.1.2	Kondisi Demografi Kabupaten Gowa.....	47
4.1.3	Visi, Misi Kabupaten Gowa.....	50
4.1.4	Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Gowa	51
4.1.5	Visi, Misi Dinas Pertanian Kabupaten Gowa.....	52
4.1.6	Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gowa	53
4.1.7	Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Gowa	55
4.2	Penyelenggaraan Pengembangan Sektor Pertanian Kabupaten Gowa	56
4.2.1	Gambaran Fasilitas Pertanian Kabupaten Gowa.....	56
4.2.2	Pelaksanaan Pengelolaan Pertanian Kabupaten Gowa	57
4.2.3	Perencanaan Perkembangan Pupuk Organik.....	66
4.2.4	Penanganan Produktivitas Pupuk Organik	72
4.2.5	Pemanfaatan Jerami Padi Sebagai Pupuk Organik.....	79
4.2.6	Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		92
5.1	Kesimpulan	92
5.2	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....		100
LAMPIRAN.....		103

DAFTAR TABEL

Table 1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	86
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase PDRB Menurut Sektor Kabupaten Gowa	4
Gambar 2. Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Gowa	5
Gambar 3. Luas tanam, Panen, Produksi padi di Kabupaten Gowa	6
Gambar 4. Kerangka Konsep.....	39
Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Gowa.....	47
Gambar 6. Indikator Kependudukan Kabupaten Gowa.....	48
Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gowa	54

ABSTRAK

NUR ZAKIAH AWALIAH, Nomor Induk Mahasiswa E051191003, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pertanian Kabupaten Gowa**”, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Gowa khususnya pemanfaatan sarana dalam meningkatkan produksi pertanian yakni sarana pupuk di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Gowa khususnya pemanfaatan sarana dalam meningkatkan produksi pertanian yakni sarana pupuk di Kabupaten Gowa meliputi 3 (tiga) hal yakni perencanaan pupuk organik, pengembangan pupuk organik, penanganan pupuk organik yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan serta proses akhir. Walaupun dalam pelaksanaan tentu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pengembangan sektor pertanian

ABSTRACT

NUR ZAKIAH AWALIAH, Student Identification Number E051191003, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Thesis entitled "Implementation of Local Government Policies in the Development of the Agricultural Sector of Gowa Regency", under the guidance of Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. as Principal Supervisor and Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si. as Co-Supervisor.

This study aims to determine the implementation of policies in the development of the agricultural sector in Gowa Regency, especially the use of facilities in increasing agricultural production, namely fertilizer facilities in Gowa Regency. This research uses descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. The location of this research is at the Agriculture Office of Gowa Regency.

The results of this study indicate that the implementation of policies in the development of the agricultural sector in Gowa Regency, especially the use of facilities in increasing agricultural production, namely fertilizer facilities in Gowa Regency, includes 3 (three) things, namely organic fertilizer planning, organic fertilizer development, organic fertilizer handling which includes sorting, collecting, processing and final processing. Although the implementation certainly has some advantages and disadvantages.

Keywords: Policy Implementation, Local Government, Agriculture Sector Development

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang dimana sektor pertanian merupakan memiliki peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke-4 tentang peran pemerintah yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memberikan arti bahwa pemerintah mempunyai peran utama dalam pembangunan nasional dalam kesejahteraan rakyat.(Haris, n.d.)

Melihat dari potensi dan kekayaan yang sebagian besar adalah masyarakat agraris maka Indonesia memiliki potensi pembangunan nasional dalam jangka panjang dalam bidang pertanian. Selain itu peran sektor pertanian merupakan sumber penghasilan bahan kebutuhan pokok, sandang serta papan. Khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang menyangkut produksi pangan. (Haris, n.d.)

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dengan pemanfaatan yang optimum serta dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia.(Haris, n.d.). Akan tetapi, kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat menanggulangi setiap permasalahan yang terjadi dimasyarakat dengan membuat kebijakan tersendiri. (Sholihin Ali, 2015)

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam perlindungan dan pemberdayaan petani adapun yang menjadi sarana dalam meningkatkan produksi pertanian, salah satunya yaitu pupuk. Pupuk merupakan sarana produksi terpenting dalam budidaya tanaman, sehingga ketersediaannya mutlak diperlukan untuk keberlanjutan produktivitas tanah dan tanaman serta ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan peta masalah pupuk subsidi di Indonesia yang dikeluarkan oleh PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) menjelaskan bahwa setidaknya pada tahun 2009 sampai 2011 permasalahan pendistribusian pupuk subsidi terjadi pada tingkat pengetahuan petani terkait aturan pupuk subsidi masih kurang, ketidaksesuaian pada pendataan, keterlambatan pengiriman, harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), pemanfaatan pupuk subsidi diluar dari sektor usaha tani, pemanipulasian kemasan, penimbunan serta permasalahan yang lain.

Pengalokasian pupuk bersubsidi kepada petani secara manual dapat menimbulkan celah dalam konsepnya sehingga menjadikan beberapa

masalah baik dalam penganggaran maupun pendistribusian pupuk subsidi di lapangan. Masalah ketersediaan pupuk subsidi di lapangan mempengaruhi dari 6 Asas tepat yang dicanangkan oleh pemerintah meliputi tepat pada jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga.

Penyediaan pupuk bersubsidi sering kali lebih rendah dari kebutuhan yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah terkait. Perbedaan pola produksi pupuk pabrikasi dengan jumlah dan waktu yang tetap namun kebutuhan petani yang dipengaruhi iklim atau musim menjadikan salah satu penyebab kekurangan penyaluran pupuk di suatu daerah. Masalah harga juga merupakan alasan penyebab penyerapan pupuk bersubsidi kurang maksimal. Kelangkaan jumlah atau pasokan pupuk dan tingginya harga pupuk yang terkadang menjadikan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak diberlakukan di lapangan. Salah satu hal yang juga berperan dalam permasalahan pelaksanaan distribusi pupuk subsidi adalah aspek pengawasan.

Salah satu penyebab penyimpangan perilaku petani dalam pembelian pupuk adalah lemahnya peran kelompok tani dalam mengelola distribusi pupuk. Mengingat bahwa Kabupaten Gowa menjadi salah satu kabupaten yang menjadi penunjang pangan di Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagian besar penduduk Kabupaten Gowa mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian. (Nur & Latief, 2023)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa merilis bahwa hingga saat ini sektor pertanian masih menjadi sektor andalan bagi perekonomian Kabupaten Gowa. Pada tahun 2022 tiga sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antara lain : sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 28,74%, disusul sektor perdagangan sebesar 12,51% dan sektor konstruksi sebesar 11,37%.

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peranan setiap sektor-sektor ekonomi besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi di daerah merupakan hasil perencanaan serta pengembangan pertumbuhan yang dilaksanakan di daerah. Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi terhadap produk domestik regional bruto suatu daerah maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.



Gambar 1. persentase PDRB menurut sektor Kabupaten Gowa 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa

Semestinya penduduk desa yang tinggal di perdesaan dapat hidup makmur dan sejahtera. Akan tetapi pada kenyataannya belum berkondisi demikian, karena sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan khususnya

para petani/buruh tani masih banyak yang miskin . Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia terutama kemiskinan pedesaan yaitu yang berhubungan dengan indikator kesejahteraan petani, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), upah yang diterima buruh tani, inflasi, pendapatan perkapita.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa merilis bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Gowa cenderung menurun pada tahun 2015 yaitu 31,61% menjadi 28,42% pada tahun 2022.



Gambar 2. perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Tahun 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa

Gambaran tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Gowa. Seperti yang dirilis oleh Dinas Pertanian beberapa wilayah terkait dengan luas lahan dan produksi beras setiap kecamatan di Kabupaten Gowa, yakni :

Kecamatan Subdistrict	Luas Tanam (ha) Planted Area	Luas Panen (ha) Harvested Area	Produksi (ton) Production	Produktivitas (ton/ha) Productivity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bontonompo	4 734	4 734	34 085	7,20
2. Bontonompo Selatan	3 127	2 791	19 537	7,00
3. Bajeng	8 018	7 920	57 024	7,20
4. Bajeng Barat	3 614	3 627	24 301	7,00
5. Pallangga	6 062	6 338	44 366	7,00
6. Barombong	3 473	3 503	25 222	7,20
7. Somba Opu	1 998	1 904	13 328	7,00
8. Bontomarannu	1 895,77	1 947,06	12 656	6,50
9. Pattallassang	3 778,34	3 985,04	27 098	6,80
10. Parangloe	1 647,63	1 605,50	10 436	6,50
11. Manuju	2 672,89	2 420,11	15 247	6,30
12. Tinggimoncong	2 453,42	2 207,49	13 245	6,00
13. Tombolo Pao	4 296,55	4 272,06	25 205	5,90
14. Parigi	2 463,22	2 703,27	15 409	5,70
15. Bungaya	3 113,80	2 855,14	18 273	5,40
16. Bontolempangan	4 799,06	3 866,29	20 491	6,30
17. Tompobulu	6 326,57	4 116,14	26 755	6,50
18. Biringbulu	2 985,45	2 758,14	16 825	6,10
Kabupaten Gowa	67 458,7	63 553,24	419 503	6,60

Sumber/Source: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, 2022
Department of Food Crop Agriculture and Horticulture of Gowa Regency, 2022

Gambar 3. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa, 2022

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gowa

Dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007, pada tanggal 13 april 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani merupakan salah satu bagian dari peranan pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya dalam hal ini petani, petani diatur dan ditata dalam wadah kelompok tani di tiap desa di tingkat Kecamatan sehingga memudahkan proses penyuluhan pertanian. Dan ini juga sejalan dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani. (Sholihin Ali, 2015)

Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu bagian dari peranan pemerintah untuk melindungi dan mengembangkan secara konsisten untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.

Dan mensejahterahkan rakyatnya khususnya petani dan juga diharapkan mewujudkan revitalisasi pertanian yang luas, sehingga mampu mencerdaskan para petani, dapat merubah sistem pertanian untuk maju dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, dalam hal ini perangkat penyuluh pertanian yang proaktif dengan petani dan penyuluh yang profesional. (Sipahutar, 2022)

Untuk itu diperlukan dukungan sumber daya manusia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan melalui pendekatan kelompok yang dapat mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan). Sehingga adanya hal tersebut perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok petani yang kuat dan mandiri untuk meningkatkan pendapatannya. (Sholihin Ali, 2015)

Dengan adanya pemberdayaan petani ini diarahkan pada pemberian pelatihan, dan penyuluhan, pemberian bantuan bibit dan pupuk, dan pemberian bantuan teknologi pertanian kepada kelompok tani. Hadirnya pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu dan menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam

mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.
(Sholihin Ali, 2015)

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah disingkat dengan OPD, dalam hal ini dinas pertanian memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selain itu, dinas pertanian juga memiliki program dalam kesejahteraan petani yakni memastikan memberikan asuransi usaha tani padi (AUPT).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki tiga (3) prinsip dasar dalam meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan, yang bertujuan untuk meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan, yang diukur dengan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, yaitu :

1. membentuk masyarakat yang unggul dan tangguh melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan yang dilakukan salah satunya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. meningkatkan infrastruktur yang berkualitas terintegrasi dan berwawasan lingkungan dan terakhir mengembangkan tata kelola pemerintahan yang inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Kecamatan Bontonompo salah satu bagian dari Kabupaten Gowa yang memiliki luas wilayah 33,62 km. Kelompok tani di Kecamatan Bontonompo Dusun Bontolangkasa Desa Borongkanang merupakan daerah yang mengalami beberapa persoalan yakni rendahnya tingkat pendidikan dari anggota kelompok tani sehingga kurang mampu menerima inovasi berupa cara tanam dari pelatihan maupun penyuluhan, masih lambatnya penyediaan pupuk bersubsidi sehingga terdapat beberapa anggota kelompok tani yang membeli pupuk di agen atau distributor yang harganya lebih mahal.

Adapun permasalahan dialami petani dari tahun 2019 hingga tahun 2022 beberapa tanaman mati di sebabkan dari bibit dan tanah yang kurang bagus, banyaknya hama di lahan petani sehingga mengurangi produksi tanaman. Selain itu, keuntungan yang di dapatkan petani hanya 50% dari modal dan keuntungan. Dalam hal ini dari tahun ke tahun tertentu tidak sesuai dengan kondisi ideal. Sehubungan adanya persoalan diatas mengakibatkan buruh petani kehilangan pekerjaan dan kesejahteraan disebabkan oleh upah minimum.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis terinspirasi untuk meneliti dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN GOWA.** Sehubungan dengan penjabaran latar belakang dan gambaran awal tentang kondisi di Kecamatan Bontonompo Dusun Bontolangkasa Desa Borongkanang , maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan oleh dinas pertanian kabupaten gowa dalam pengembangan sektor pertanian di kabupaten gowa?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah tentang pengembangan sektor pertanian di kabupaten gowa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan kegiatan oleh dinas pertanian kabupaten gowa dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah tentang pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Gowa

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
 - a. Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan acuan serta referensi bagi kalangan akademisi dalam melakukan kajian lebih lanjut terkait pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Gowa.

b. Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi para pembaca dan peneliti yang sedang melakukan penelitian terkait dengan pengembangan sector pertanian di Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Gowa.

3. Manfaat Metodologis

Secara metodologis, penelitian ini diharapkan mampu lebih mengembangkan pengetahuan menulis serta berpikir bagi peneliti yang nantinya hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan Pemerintah Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian dasar teori yang digunakan untuk memperjelas dalam suatu permasalahan penelitian. Teori yang digunakan berkaitan dengan teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, perlindungan dan pemberdayaan petani, baik yang mengacu pada teori maupun peraturan yang telah ditetapkan. Teori maupun landasan hukum tersebut digunakan untuk menganalisis data lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder. Berikut adalah teori-teori yang diperuntukan dalam penelitian ini.

2.1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

2.1.1 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

Secara etimologis, istilah kebijakan atau "*policy*" berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*polis*" berarti negara. Istilah kebijakan atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor seperti seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kebijakan selama ini sering didefinisikan sebagai rangkaian konsep yang dijadikan pedoman dasar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, serta suatu upaya yang mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk

memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya keldikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. (Nadialista Kurniawan, 2021)

Menurut Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Secara umum kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.(Nadialista Kurniawan, 2021)

2.1.2 CIRI-CIRI KEBIJAKAN PUBLIK

Adapun ciri-ciri dari kebijakan publik, yakni kegiatan administrasi yang lingkupnya mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan lingkup lainnya. Untuk mengarah ke tujuan yang telah ditentukan. Selain itu David Easton menyebutkan beberapa ciri-ciri kebijakan publik, ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai pelaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri
3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam pengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas buta aksara, menggalakkan program keluarga berencana, dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan

mencangkup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negatif, ia kemungkinan secara keseluruhan (*community as a whole*) dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi privat, atau organisasi nonpemerintah atau swasta yang umumnya hanya memiliki daya ikat internal dan terbatas.

2.1.3 PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan, tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Menurut Thomas R. Dye (1992:328) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut :

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah

2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu

3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui

organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif

4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres

5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi

6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik)

2.1.4 KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Implementasi kebijakan menjadi upaya untuk membangun hubungan yang memungkinkan untuk kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah perolehan aktivitas pemerintah, dengan upaya tersebut dirancang dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Konsep implementasi kebijakan menjadi aspek utama dalam yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Sesuai dengan pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. (Wibawa, 1994)

Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.(Wibawa, 1994)

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. (Wibawa, 1994)

Menurut Quade (1984: 310), alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi.(Wibawa, 1994)

Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan
- 2) kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya
- 3) organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan
- 4) faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Singkatnya, bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah langkah pemerintah untuk merealisasikan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Sesuai beberapa penjelasan diatas, maka implementasi kebijakan sesuai dengan kriterianya adalah langsung mempraktekkan dalam bentuk program dalam proses pembentukan kebijakan.

Analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program publik. Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengambilan

keputusan di sektor publik, oleh karena itu dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam menghadapi kemajuan masa yang akan datang. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

2.2 PEMERINTAH DAERAH

2.2.1 KONSEP PEMERINTAH DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya” serta berbagai produk – produk kebijakan lainnya.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Sholihin Ali, 2015)

Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, diharapkan Pemerintah Daerah mampu untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pemerintah Daerah pun dapat memberdayakan potensi-potensi daerah yang dapat menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Ateng Syarifudin tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur rumah tangganya sendiri, agar meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Otonomi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Pusat masih terlibat agar tetap terjaga integritas dari daerah otonom sebagai bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan salah satu strategi penyelenggara

pemerintahan yang lebih mengedepankan kemandirian daerah dan partisipasi masyarakat. (Hamid, 2018)

Terkait dengan pembangunan masyarakat dituntut untuk lebih berperan. Dengan demikian otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat terwujud. (Sholihin Ali, 2015)

2.2.2 TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tugas pemerintah daerah yaitu:

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama DPRD.
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Menyusun dan mengajukan suatu rancangan Perda mengenai RPJPD dan rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta melakukan penyusunan dan menetapkan RKPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama

5. Mewakili daerahnya didalam dan juga diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
7. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yaitu mengatur jalannya pemerintahan dan mengelola sumber daya alam yang ada di suatu daerah diperlukan pembagian tugas yang efektif dan efisien sehingga visi dan misi daerah dapat tercapai.

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu :

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2.3 PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

2.3.1 PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

Pengembangan sering diartikan sebagai istilah pertumbuhan dan pembangunan. Pengembangan pertanian merupakan upaya peningkatan kesejahteraan pertanian mulai dari aspek sumberdaya manusia, produksi dan aspek-aspek yang mendukung lainnya. Pengembangan pertanian memiliki arah pembangunan untuk mencapai adanya swasembada pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan pertanian menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan pendapatan, produktivitas usahatani dengan penambahan jumlah modal dan skill, serta memberikan ruang campur tangan manusia dengan perkembangan hewan dan tumbuhan yang diusahakannya.

Secara bertahap pemerintah Indonesia mengupayakan adanya pembangunan-pembangunan sentral komoditas pertanian dalam suatu wilayah tertentu yang akan meningkatkan suatu produktivitas dan produksi hasil panen. Pembangunan tata ruang daerah disesuaikan dengan pengembangan daerah berbasis produktivitas daerah seperti hasil pertanian yang dapat dikembangkan menjadi kota sentra pertanian atau agropolitan.

Indonesia yang memiliki potensi pertanian besar perlu adanya suatu kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Ada beberapa pertimbangan perlu adanya pengembangan pertanian di Indonesia

seperti potensi alam yang melimpah dan banyaknya penduduk desa yang bermata pencaharian sebagai petani.

Dengan melihat kondisi tersebut maka perlu adanya suatu peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan pertanian tanpa menimbulkan kerusakan, tenaga kerja sektor pertanian melimpah serta potensi untuk mengatasi kekurangan bahan pangan.

Daerah yang menjadi pusat pengembangan pertanian perlu upaya pemaksimalan sumberdaya dan peningkatan luasan lahan serta peningkatan produksi komoditas pertanian. Pengembangan pertanian menjadi salah satu fokus pembangunan perekonomian nasional karena kontribusi sektor pertanian di beberapa aspek yang tidak hanya dalam penyediaan bahan pangan bagi masyarakat. Luaran sektor pertanian dapat berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan, penyedia bahan pakan, penyedia bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan serta penyumbang dalam produk domestik bruto (PDB). (Mayrowani, 2012)

Seiring berjalannya waktu perkembangan pertanian memiliki perubahan menjadi pertanian yang modern. Pengembangan pertanian modern merupakan pembangunan pertanian yang menjadi langkah strategis pembangunan pertanian berkelanjutan. Pengembangan pertanian berkelanjutan sebagai paradigma baru yang akan mendorong daya beli masyarakat pedesaan sehingga meningkatkan pertumbuhan sektor non pertanian.

Selain itu, dalam aspek pengembangan pertanian yaitu pertanian modern. Dengan adanya istilah pertanian modern merupakan perubahan tatanan pengembangan dan pembangunan pertanian yang dulunya berfokus pada industrialisasi mulai berubah menjadi peningkatan produktivitas dan daya saing dengan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

Termasuk di dalamnya adalah menjadikan sistem yang ada pada pengembangan pertanian lebih terintegrasi dengan kajian disiplin ilmu yang lain seperti ekonomi, pemasaran dan lain sebagainya. Selain dari itu pertanian modern juga perlu menjadikan arah proses, output dan outcomenya menjadi satu integrasi dengan pertanian berkelanjutan. Ada 3 aspek penting dalam pertanian berkelanjutan yaitu aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek alam. Ketiga aspek tersebut yang juga dikembangkan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian.

Hal tersebut agar kebijakan pembangunan pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi tetapi juga tetap menjaga ekosistem dan tatanan sosial masyarakat. Basis kegiatan ekonomi berasal dari sistem sosial yang stabil dan sehat serta kecukupan sumberdaya alam dan lingkungan, sedangkan kesejahteraan ekonomi akan menjadikan terpeliharanya sistem sosial dan kelestarian SDA dan lingkungan. (Ili & Pustaka, 2011)

Ada beberapa syarat dalam suatu pembangunan pertanian yang harus dipahami oleh pembuat dan pelaku kebijakan pembangunan

pertanian agar pembangunan pertanian semakin berkembang. Menurut Arthur Mosher pada bukunya yang berjudul "Getting Agriculture Moving" yang disarikan oleh Arifin (2005) menjelaskan adanya syarat yang perlu diperhatikan dalam suatu pembangunan pertanian. Syarat-syarat tersebut yaitu ketersediaan pasar hasil, inovasi teknologi, sarana produksi, insentif yang tersistem dan transportasi menjadi syarat pokok sedangkan faktor kredit usaha/produksi, tingkat pendidikan, kelembagaan petani, rehabilitasi lahan, rancangan pembangunan pertanian menjadi syarat pelancar pembangunan pertanian.(li & Pustaka, 2011)

2.3.2 KONSEP DINAS PERTANIAN

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah disingkat dengan OPD, dalam hal ini dinas pertanian memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Selain itu, dinas pertanian juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lain seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutus kebijakan bidang pangan, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian. (Sipahutar, 2022).

Ada pun yang menjadi tugas dinas pertanian adalah penjamin kesejahteraan petani melalui program memastikan memberikan asuransi usaha tani padi (AUPT).

2.3.3 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Gowa berdasarkan peraturan Bupati Gowa Nomor 36 Tahun 2008 dapat di uraikan sebagai berikut :

- **Kepala Dinas Pertanian**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang pertanian serta tugas pembantuan yang di berikan oleh pemerintah dan melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh bupati.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugas dinas;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pemberian pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis organisasi
- d. Pengamanan dan pengendalian tugas pokok dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh bupati;

- **Sekertaris Dinas Pertanian**

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga dinas

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Penyiapan bahan penyusunan anggaran, pelaporan dan pembinaan organisasi tatalaksana;

- c. Pengolahan administrasi kepegawaian, surat menyurat perizinan, perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan;
- d. Penyiapan data dalam rangka penyelenggaraan evaluasi dan hubungan masyarakat serta penyelenggaraan inventarisasi;
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan
- **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok:**
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan evaluasi data serta pelaporan;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- **Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas Pokok:**
 - a. Melaksanakan proses pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- **Bidang Tanaman Pangan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dines pada urusan produksi tanaman pangan.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka bagian tanaman pangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan rencana kegiatan pengembangan produksi tanaman pangan;
- b. Penyiapan pengembangan teknologi produksi tanaman pangan;
- c. Pengaturan pola pengadaan dan penyaluran benih/bibit tanaman pangan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pemimpin.

- **Bidang Hortikultura**

Mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas dines dalam bidang produksi hortikultura. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka bidang hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana bagian penyiapan paket teknologi, pengembangan benih/bibit dan produksi hortikultura;
- b. Melaksanakan bimbingan terhadap petani, kelompok tani, penangkar benih, dan balai benih hortikultura;
- c. Pengembangan komoditi hortikultural
- d. Mengadakan evaluasi monitoring dan pembinaan peningkatan produksi hortikultura;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

- **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada urusan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- b. Mengadakan monitoring dan evaluasi penetapan harga dasar pada tingkat pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- c. Menggumpulkan, mengolah dan menganalisa data ekonomi pemasaran hasil pertanian;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin

- **Bidang prasarana dan sarana pertanian (PSP)**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang pengolahan lahan dan air. Bidang pengolahan lahan dan air mempunyai tugas:

- a. Penyusunan program pelaksanaan pengelolaan lahan, air dan perlindungan tanaman;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha pemanfaatan dan pengadaan alat-alat pertanian;

d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

2.3.4 DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI

Kebutuhan pupuk merupakan kebutuhan petani yang cukup besar karena pupuk menjadi faktor input dalam usaha tani dan penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu mekanisme penyediaan pupuk subsidi diatur oleh pemangku kebijakan terkait. Pemerintah dalam mengupayakan penyediaan pupuk diterapkanlah kebijakan pupuk bersubsidi bagi petani. Kebijakan pupuk bersubsidi merupakan upaya pemerintah untuk mendorong produksi dan produktivitas petani sebagai pelaku utama usahatani serta peningkatan pendapatan petani.

Kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia dikelola melalui PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen pupuk bersubsidi. PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberikan kewenangan sebagai pelaksana dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk seluruh daerah di Indonesia.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Pemerintah. Kewenangan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) disesuaikan dengan kemampuan produksi agar lebih fleksibel, efisien dan efektif.

Pupuk bersubsidi yang berasal dari produsen pusat kemudian

didistribusikan melalui produsen ditingkat provinsi dan distributor pupuk ditingkat kabupaten dan secara berjenjang akan disalurkan kepada kios pupuk lengkap (KPL) atau pengecer pupuk yang tersebar di daerah-daerah.

KPL-KPL tersebut adalah pelaku pendistribusian pupuk subsidi yang secara langsung berhadapan dengan petani sebagai sasaran dari kebijakan pupuk subsidi. Kios binaan atau pengecer merupakan pengecer pupuk resmi yang mendapatkan surat dari produsen untuk penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Subsidi sendiri merupakan salah satu cara pemerintah menjaga stabilitas suatu barang atau jasa. Subsidi dapat didefinisikan yaitu sejumlah bantuan keuangan dari pemerintah untuk menjaga harga barang atau jasa dalam sektor bisnis atau industri agar tetap rendah.

Agar manfaat subsidi dapat dirasakan oleh pelaku utama usahatani (petani) maka diberlakukan kebijakan distribusi agar subsidi dapat merata. Kebijakan pupuk bersubsidi diarahkan untuk mencapai 2 tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan petani untuk mengakses pupuk sesuai kebutuhan
2. Tujuan akhir yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian

Distribusi pupuk subsidi melibatkan pelaku-pelaku distribusi yang secara bersinergi melakukan tugasnya masing-masing. Pelaku distribusi pupuk subsidi secara sederhana melibatkan distributor, pengecer/kios pupuk, dan kelompok tani. Peran pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan jajaran dibawahnya hingga pada tingkat bawah yaitu penyuluh pertanian lapangan (PPL) bertugas sebagai pelaksana sekaligus fasilitator ataupun regulator. (Sipahutar, 2022)

Adanya campur tangan pemerintah dalam perdagangan pupuk merupakan suatu kebutuhan dalam rangka menjamin produksi dan produktivitas bahan pangan tersebut. Peran serta pemerintah dalam distribusi pupuk subsidi juga berkaitan dengan masih adanya temuan-temuan penyelewengan dalam distribusi pupuk subsidi di lapangan dimana penyelewengan tersebut dapat terjadi pada semua proses penyaluran pupuk subsidi.

2.3.5 PENYULUHAN PERTANIAN

Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu mengorganisasikan dirinya agar mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya yang lainnya. Proses penyuluhan memungkinkan terciptanya produktivitas dan efisiensi usaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, serta sikap sadar akan pelestarian fungsi lingkungan hidup. (Amalia Yunia

Rahmawati, 2020)

Prinsipnya proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan ketersediaan sumberdaya yang memadai. Sumberdaya tersebut seperti tenaga penyuluh yang profesional, kelembagaan penyuluhan yang handal, materi penyuluhan yang berkelanjutan, sistem penyelenggaraan penyuluhan yang benar serta metode penyuluhan yang tepat dan manajemen penyuluhan yang sinergi. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

Kepemimpinan, komunikasi, diseminasi teknologi dan penguasaan terhadap bidang teknis yang dijelaskan harus dikuasai oleh penyuluh guna tercapainya efektifitas penyuluhan. Pemerintah dalam penyuluhan memiliki andil yang cukup penting selain sebagai pelaku regulator.

Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk pengembangan kompetensi kelompok hendaknya lebih kepada pengembangan kepemimpinan lokal serta pengembangan-pengembangan sumberdaya manusia. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

Metode penyuluhan pertanian merupakan cara penyampaian materi (isi pesan) dari suatu program penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh kepada petani dan keluarganya baik

langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu untuk menerima inovasi baru. Penyuluhan dapat dilakukan pada lingkup kecil atau besar. Metode penyuluhan dapat dibedakan menjadi pendekatan perorangan, kelompok dan massal. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

Beberapa kegiatan dari program penyuluhan diantaranya yaitu (Amalia Yunia Rahmawati, 2020) :

- 1) menyusun materi penyuluhan
- 2) penerapan metode penyuluhan
- 3) mengembangkan kelembagaan petani
- 4) melakukan kunjungan tatap muka dengan petani secara perorangan atau massal
- 5) melakukan kunjungan tatap muka dengan kelompok tani
- 6) memandu pelaksanaan demonstrasi usahatani melalui demonstrasi plot/fram/area
- 7) melaksanakan temu lapang/ temu tugas/ temu teknis/ temu karya/ temu usaha
- 8) menyampaikan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk flipchart/ peta singkat/ foto dan poster

Penyuluhan dapat berjalan dengan maksimal apabila dalam penyelenggaraannya didukung oleh komponen-komponen yang

sesuai dengan kebutuhan dan fungsi dasarnya.

2.3.5 KELOMPOK TANI

Menurut UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dijelaskan bahwa Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. (Sholihin Ali, 2015)

Kelompok tani merupakan komponen utama dalam penyuluhan selain dari peran penyuluh pertanian. Kelompok tani dibentuk atas struktur-struktur yaitu internal structure atau psyco group dan eksternal structure atau socio group. Eksternal structure atau dinamika kelompok merupakan aktivitas untuk menanggapi tugas yang timbul karena tantangan lingkungan dan kebutuhan termasuk juga tuntutan dalam peningkatan produktivitas. (Ramdhani et al., 2015)

Internal structure berhubungan dengan norma atau pranata yang terbentuk guna mengatur anggota kelompok tani sehingga terbentuk kedudukan, peran tanggungjawab demi mencapai tujuan atau prestasi kelompok.

Ketua kelompok tani memiliki posisi sebagai penyalur informasi

yang diberikan oleh penyuluh pertanian. Ketua kelompok tani merupakan perpanjangan tangan dari penyuluh pertanian yang berperan memimpin kelompok tani dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Ketua kelompok tani biasanya dipilih oleh anggota kelompok tani dalam pertemuan kelompok tani. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

Pemimpin yang dipilih berdasarkan psikologis, pengalaman, ilmu keterampilan, serta kesepakatan bersama dengan pengakuan yang penuh merupakan pemimpin dalam kelompok tani. Ketua kelompok tani merupakan percontohan bagi anggota-anggotanya dimana sesuai dengan fungsi seorang pemimpin maka ia tidak hanya memberikan perintah tetapi juga sebagai konsultan bagi para anggotanya. (Ramdhani et al., 2015)

Ketua kelompok tani perlu memiliki tingkat perhatian kepada kelompok taninya sehingga tingkat partisipasi anggotanya dapat selalu berkembang. Kedekatan antara anggota dengan ketua dalam suatu kelompok tani akan memudahkan kelompok tani meningkatkan kelas kelompok taninya.

Unsur-unsur yang berhubungan dengan dinamika kelompok secara psikologis yaitu tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas, pembinaan dan pemeliharaan kelompok, kesatuan/kekompakan kelompok, suasana (atmosfir) kelompok,

tekanan kelompok, dan efektivitas kelompok.

Suatu kelompok tani dalam menerapkan suatu inovasi atau teknologi pertanian juga dipengaruhi dari keeratn ikatan sosial dalam kelompok tani tersebut. Ikatan sosial berkaitan dengan dengan keterikatan satu anggota dengan anggota lain dalam memahami kesamaan posisi serta pembagian peran sosial dalam kelompok. (Ramdhani et al., 2015)

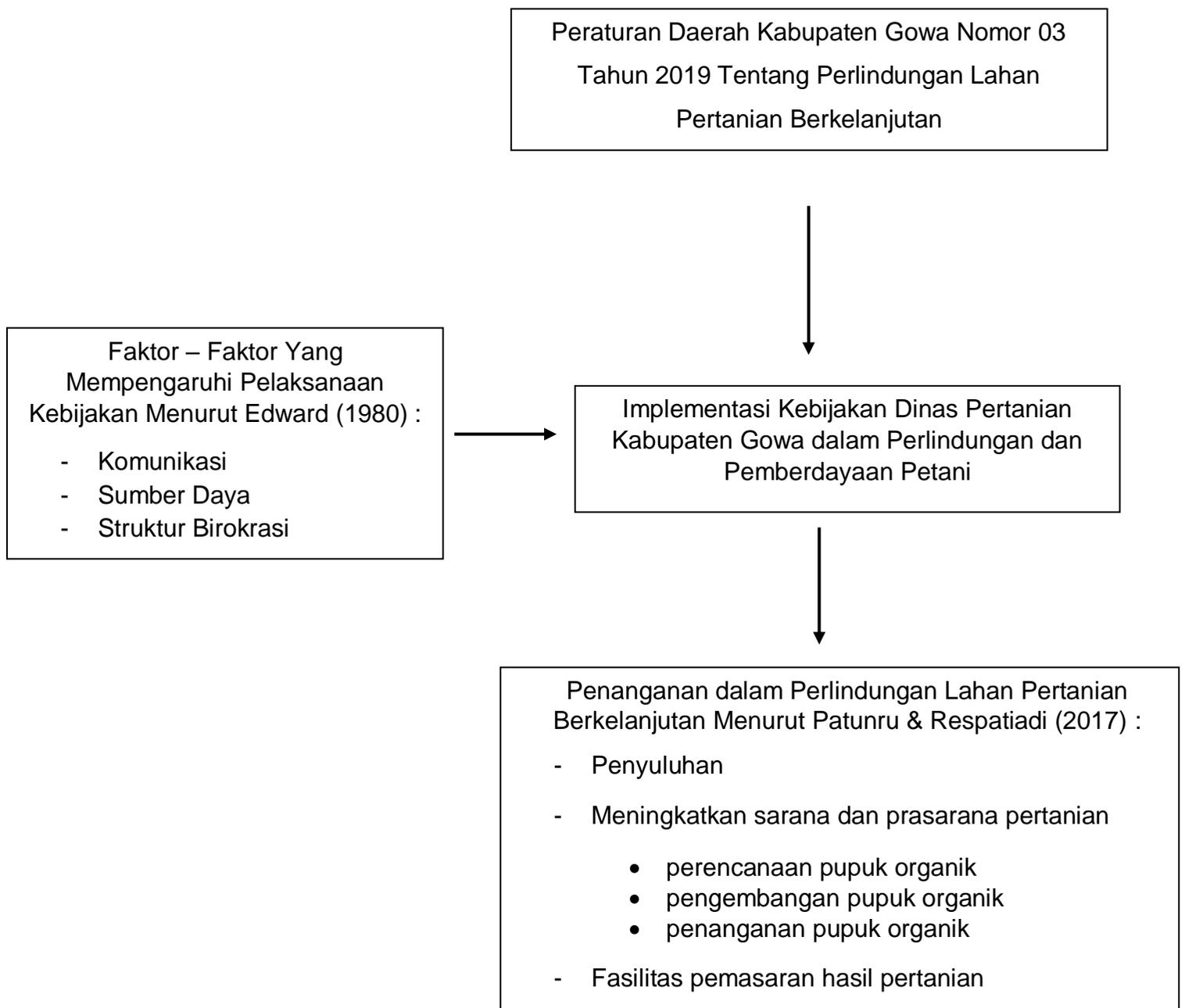
Ikatan sosial yang terbentuk akan menimbulkan peranan sosial dalam kelompok tani. Peranan sosial akan memberikan pengaruh yang dapat berupa sugesti, larangan, maupun dukungan kepada masyarakat secara luas untuk melakukan suatu hal. Petani yang tergabung dalam suatu kelompok tani cenderung memiliki kesamaan dalam pembentukan persepsi karena arus informasi dilakukan melalui satu pintu. (Ramdhani et al., 2015)

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas, kerangka konseptuan penelitian diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai topik yang akan diteliti.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berupaya untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Terdapat beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian, maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 4. Kerangka Konseptual